

Representasi Nelayan Kecil dalam Wacana Resmi NCICD 2024–2025: Studi Analisis Wacana Kritis van Dijk

Muchammad Wafi Kafabihi
Email: mwafikafabihi@gmail.com

Abstract:

This study examines how state, media and community actors frame coastal risk and land subsidence in North Java–Jakarta through the Giant Sea Wall/NCICD discourse (2024–2025), and the implications for ecological justice. Using van Dijk’s framework, we analyse macrostructures (dominant themes), superstructures (argument patterns) and microstructures (lexical choices, agency, euphemisms) across policy releases, mainstream coverage and community texts. Three findings stand out. First, technocratic euphemisms such as “protection” and “territorial resilience” shift attention away from river-basin management, groundwater extraction and distributional burdens toward a single coastal megastructure. Second, techno-branding (“giant/hybrid sea wall”) and icons like “ten million bamboo” build an ethos of innovation while obscuring technical uncertainty, social costs and ecological trade-offs. Third, community counter-discourses foreground impacts on small-scale fishers, navigation access and the risk of inland flood stagnation when catchment reforms lag. The study is limited to open texts and does not assess hydraulic performance. Practical implications include operational definitions for key terms, auditable performance metrics, a who-gets-what matrix for risks and benefits, and FPIC-based participation that recognises local knowledge. Socially, the findings support a shift from a “mega-wall” narrative to a layered adaptation portfolio combining groundwater control, upstream water management, retention space and ecosystem rehabilitation. The article’s contribution lies in integrating van Dijk’s approach with an ecological-justice lens to expose how language normalises and legitimises large-scale coastal policy.

Keyword: ecolinguistics; critical discourse analysis; van Dijk; ecological justice; NCICD

Abstrak:

Penelitian ini menelaah bagaimana aktor negara, media, dan komunitas membingkai risiko pesisir serta penurunan tanah di Pantura–Jakarta melalui wacana Giant Sea Wall/NCICD pada 2024–2025, beserta implikasinya bagi keadilan ekologis. Berbasis kerangka van Dijk, analisis mencakup makrostruktur (tema dominan), superstruktur (pola argumen), dan mikrostruktur (pilihan leksikal, gramatika agensi, eufemisme). Korpus mencakup rilis kebijakan, liputan arus utama, dan teks komunitas relevan. Tiga temuan kunci muncul. Pertama, eufemisme teknokratis seperti “perlindungan” dan “ketahanan wilayah” menggeser fokus dari tata air darat, ekstraksi air tanah, dan distribusi beban menuju satu ikon solusi di garis pantai. Kedua, techno-branding “giant/hybrid sea wall” serta ikon “sepuluh juta bambu” membangun ethos inovasi sambil menutupi ketidakpastian teknis, biaya sosial, dan trade-off ekologis. Ketiga, kontra-wacana komunitas menonjolkan dampak pada nelayan kecil, akses pelayaran, dan potensi stagnasi banjir darat bila pembenahan DAS tertinggal. Keterbatasan studi terletak pada ketergantungan pada teks terbuka dan tidak menilai performa hidrolik. Implikasi praktis meliputi keharusan definisi operasional istilah kunci, metrik kinerja yang dapat diaudit, matriks siapa-mendapat-apa untuk risiko/manfaat, serta partisipasi berbasis FPIC yang mengakui pengetahuan lokal. Implikasi sosial menunjuk perlunya pergeseran dari narasi “mega tanggul” menuju portofolio adaptasi berlapis yang menggabungkan pengendalian ekstraksi air tanah, tata air hulu, ruang retensi, dan rehabilitasi ekosistem. Kontribusi artikel ini adalah integrasi kerangka van Dijk dengan lensa

keadilan ekologis untuk menyingkap cara bahasa menormalkan, melegitimasi, dan memprioritaskan kebijakan pesisir berskala besar.

Kata Kunci: ekolinguistik; analisis wacana kritis; van Dijk; keadilan ekologis; NCICD

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir utara Jawa, khususnya Jakarta Utara, menghadapi kombinasi penurunan tanah, rob, dan tekanan pesisir lain yang meningkatkan risiko sosial-ekologis. Di tengah tekanan itu, NCICD dan proyek tanggul pantai dikomunikasikan sebagai solusi utama untuk melindungi infrastruktur strategis dan permukiman. Di ruang kebijakan, kata-kata bukan sekadar sarana penjelas; pilihan istilah membingkai masalah, mengatur prioritas, dan menyaring siapa yang terlihat serta dihitung dalam keputusan publik. Nelayan kecil, yang bergantung pada akses ruang tangkap, merupakan kelompok kunci untuk menilai sejauh mana wacana resmi mengakomodasi suara dan kebutuhan warga terdampak (Nurgiyantoro, 2019).

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan inti: bagaimana nelayan kecil direpresentasikan dalam wacana resmi mengenai NCICD pada 2024–2025, dan bagaimana representasi tersebut berelasi dengan dimensi keadilan ekologis (distribusi beban/manfaat, pengakuan, dan prosedur partisipasi)? Tujuan penelitian adalah memetakan pola bahasa antarkelompok aktor, mengidentifikasi celah representasi, dan merumuskan rekomendasi kebijakan bahasa yang dapat diaudit publik (Wahyuningsih, 2024).

KAJIAN PUSTAKA

Ekolinguistik dan cerita yang kita hidupi. Ekolinguistik menyoroti bagaimana bahasa membentuk relasi manusia–lingkungan melalui narasi, metafora, dan evaluatif yang menormalisasi praktik tertentu. Narasi “perlindungan” atau “ketahanan” dapat memperkuat tindakan kolektif, tetapi juga berpotensi menutupi distribusi beban dan menyingkirkan kelompok yang tak terwakili jika tidak diikat pada definisi operasional dan metrik dampak (Stibbe & Arran.).

Analisis wacana van Dijk. Kerangka van Dijk memeriksa tiga lapis: (1) makrostruktur yang merangkum topik dominan dan arah tema; (2) superstruktur yang mengatur logika argumen (misalnya pola masalah–solusi–manfaat); dan (3) mikrostruktur yang meliputi pilihan leksikal, gramatika agensi (aktif/pasif), nominalisasi, eufemisme, serta strategi retorik lain. Kerangka ini efektif untuk menilai bagaimana kuasa bekerja dalam teks kebijakan dan pemberitaan (Prihartono, 2022a).

Keadilan ekologis. Literatur keadilan ekologis memadukan tiga dimensi: distribusional (siapa menanggung risiko/manfaat), pengakuan (identitas, pengetahuan lokal, dan posisi sosial), serta prosedural (pelibatan yang berarti dan berkonsekuensi). Di komunitas pesisir, keadilan ekologis terkait erat dengan akses ruang tangkap, keberlanjutan ekosistem (mangrove, arus, sedimen), dan mekanisme penghidupan saat kebijakan mengubah lanskap (Chowkwanyun, 2023).

Kerentanan nelayan kecil dan komunikasi risiko. Riset kerentanan menegaskan eksposur nelayan kecil pada perubahan lingkungan dan kebijakan pesisir yang bias infrastruktur (Dunn & Dunn.). Komunikasi risiko yang efektif menuntut kejelasan instruksi, penanda ruang mikro, dan pengakuan terhadap kebutuhan operasional yang berbeda antar kelompok, bukan sekadar slogan atau angka agregat.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini menggunakan analisis wacana van Dijk pada korpus publik 2024–2025 yang terdiri dari dokumen pemerintah/instansi, peliputan media arus utama, dan teks komunitas/LSM. Komposisi ringkas korpus tersaji pada Tabel 1 (total 11 dokumen: Negara 2; Media 8; LSM/Komunitas 1; rentang Januari 2024–September 2025). Unit analisis meliputi judul, lead, dan paragraf inti; pada materi visual, transkrip atau keterangan resmi digunakan sebagai teks.

Analisis dilakukan pada tiga lapis (Prihartono, 2022). Pada makrostruktur, topik dominan per aktor diidentifikasi (perlindungan, ketahanan wilayah, progres fisik, dampak operasional). Pada superstruktur, pola argumen dipetakan antara “masalah–solusi–manfaat” milik wacana resmi dan “risiko–ketidakpastian–hak” pada kontra-wacana. Pada mikrostruktur, teks dikoding untuk: (i) sebutan nelayan (tidak/umum/spesifik), (ii) agensi gramatikal (subjek/objek, aktif/pasif, nominalisasi), (iii) partisipasi (sosialisasi/konsultasi/FPIC), (iv) transparansi dampak (0–2), dan (v) keberadaan eufemisme/techno-branding (“perlindungan,” “ketahanan wilayah,” “hybrid/giant sea wall,” “10 juta bambu”) serta angka legitimasi (km, jadwal). Ringkasan skor per dokumen ditampilkan pada Tabel 3, sementara agregat per aktor pada Tabel 2. Kutipan bukti (≤ 25 kata) dipilih untuk mengilustrasikan temuan tanpa menghabiskan ruang. Semua sumber bersifat publik; identitas personal non-publik tidak dicantumkan. Studi ini tidak menilai performa hidrolik struktur dan tidak melakukan survei sosial; klaim dibatasi pada representasi kebahasaan dalam teks.

Aktor	Jumlah dokumen	Rentang tanggal	Contoh outlet/instansi
Negara	2	Jan 2024 – Sep 2025	DSDA DKI, Pemprov Jateng
Media	8	Jan 2024 – Sep 2025	ANTARA, Tempo, Detik, Media Indonesia
LSM/Komunitas	1	Jan 2024 – Sep 2025	WALHI
Total	11		

Tabel 1: Komposisi Korpus

Korpus mencakup 11 dokumen yang mewakili tiga kelompok aktor (Tabel 1). Dokumen negara berfokus pada capaian fisik dan target NCICD, dokumen media memadukan berita progres dan laporan dampak lapangan, sementara teks komunitas/LSM menekankan sisi sosial-ekologis dan hak nelayan.

Aktor	Representasi nelayan	Agensi & tanggung jawab	Transparansi dampak	Partisipasi	Slogan vs data
Negara	0.50	0.50	1.50	0.00	1.00
Media	1.38	1.25	1.38	0.00	1.38
LSM/Komunitas	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00

Tabel 2: Skor Rata-rata Dimensi (0–2) per Aktor

Rerata lima dimensi pada Tabel 2 memperlihatkan pola yang konsisten. Pada Representasi nelayan, rerata negara 0,50; media 1,38; LSM/komunitas 2,00. Ini menunjukkan bahwa nelayan kecil paling jelas hadir sebagai subjek dengan kebutuhan spesifik pada kontra-wacana komunitas, cukup hadir pada media, dan tipis pada dokumen resmi. Dimensi Partisipasi sama-sama rendah (negara 0,00; media 0,00; LSM 1,00), menandakan ketiadaan atau keterbatasan mekanisme konsultasi yang berkonsekuensi. Transparansi dampak lebih tinggi pada negara dan media (1,50 dan 1,38) daripada

LSM/komunitas (1,00), tetapi transparansi itu umumnya berupa angka progres dan jadwal, bukan matriks distribusi dampak sosial. Pada Agensi & tanggung jawab, media (1,25) dan LSM (2,00) cenderung lebih jelas menyebut pelaku dan penerima dampak dibanding negara (0,50). Dimensi Slogan vs data menunjukkan dominasi slogan pada negara (1,00) dibanding LSM (1,00) dan media (1,38) yang lebih sering menghadirkan metrik dampak lapangan.

Temuan kuantitatif di atas diperkuat oleh kutipan perwakilan (Tabel 3). Di pihak negara, frase seperti “peningkatan ketahanan wilayah melalui pembangunan tanggul pantai” menggambarkan eufemisme teknokratis dengan agensi kabur. Sementara itu, kontra-wacana menampilkan dampak operasional yang konkret seperti “pembatas beton menghalangi alur nelayan hingga tiga kilometer” dan menyodorkan angka terdampak yang tidak muncul di rilis teknis (“sekitar 24.000 nelayan Jakarta Utara berpotensi terdampak”).

Kelompok	ID	Kutipan singkat	Catatan faktual (1 kalimat)
Negara	01	“peningkatan ketahanan wilayah melalui pembangunan tanggul pantai”	Eufemisme teknokratis; agensi kabur; nelayan hanya implisit.
Negara	08	“pondasi giant sea wall ditarget fungsional awal 2026”	Angka target jadi legitimasi; dampak sosial tidak diuraikan.
Kontra	05	“pembatas beton menghalangi alur nelayan hingga tiga kilometer”	Dampak operasional konkret; agensi nelayan terlihat jelas.
Kontra	03	“sekitar 24.000 nelayan Jakarta Utara berpotensi terdampak”	Media hadirkan angka terdampak yang absen di rilis teknis.

Tabel 3: Kutipan Kunci

Makrostruktur dan superstruktur.

Dokumen resmi didominasi tema “perlindungan” dan “progres fisik,” serta superstruktur masalah–solusi–manfaat: rob/subsiden sebagai masalah, tanggul sebagai solusi, dan penurunan risiko sebagai manfaat. Media kerap mempertahankan pola ini tetapi menyisipkan pengalaman lapangan yang memperlihatkan biaya operasional nelayan. Kontra-wacana memutar fokus ke risiko–ketidakpastian–hak, yakni konsekuensi

pada akses ruang tangkap, kebutuhan kompensasi, dan ketiadaan mekanisme keberatan yang mengikat.

Mikrostruktur: eufemisme, techno-branding, agensi.

Di lapis leksikal dan gramatikal, eufemisme (“ketahanan wilayah,” “penataan”) dan techno-branding (“giant/hybrid sea wall,” “10 juta bambu”) bekerja sebagai strategi legitimasi, sementara kalimat pasif dan nominalisasi mengaburkan pelaku serta penerima dampak. Sebaliknya, teks komunitas menggunakan verba aktif yang mengangkat agensi nelayan dan menyebut lokasi mikro yang relevan operasional (dermaga, alur pelayaran).

PEMBAHASAN

Normalisasi kebijakan tanpa subjek sosial.

Skor rendah pada representasi dan partisipasi dalam dokumen resmi menunjukkan normalisasi proyek melalui bahasa yang menata masalah sebagai tantangan teknis, bukan sosial-ekologis. Ini sejalan dengan temuan ekolinguistik bahwa narasi yang kuat dapat membawa tindakan, tetapi juga berpotensi menghapus kelompok kunci ketika definisi operasional penerima manfaat tidak ditegaskan.

Ketimpangan pengakuan dan prosedur.

Perbedaan antara angka legitimasi (km, jadwal) dan ketiadaan matriks distribusi dampak sosial mengindikasikan kekosongan pada dimensi pengakuan dan prosedur. Media membantu mengisi celah pengakuan melalui laporan dampak, tetapi belum mengangkat mekanisme prosedural seperti FPIC. Kontra-wacana komunitas mengartikulasikan kebutuhan operasional dan hak, namun tetap berada di pinggir struktur keputusan.

Implikasi keadilan ekologis.

Ketika nelayan hanya diposisikan sebagai “penerima manfaat” anonim, perancangan kompensasi dan pemulihan mata pencaharian cenderung tertunda atau generik. Keadilan ekologis menuntut penyejajaran narasi teknis dengan matriks distribusi dampak yang terukur, pengakuan pengetahuan lokal (alur pelayaran, musim, rute), dan

prosedur pelibatan yang memungkinkan persetujuan maupun penolakan yang berkonsekuensi terhadap desain.

SIMPULAN

Representasi nelayan kecil dalam wacana resmi NCICD 2024–2025 tipis dan prosedur partisipasi tidak terlihat, sementara angka legitimasi teknis menonjol. Media sebagian menutup celah melalui pelaporan dampak, dan kontra-wacana komunitas secara konsisten menempatkan nelayan sebagai subjek dengan kebutuhan spesifik. Agar tujuan “perlindungan” tidak berujung pada ketidakadilan pesisir, kebijakan bahasa perlu direformasi: tegaskan definisi operasional penerima manfaat, hadirkan matriks distribusi dampak terukur, dan terapkan partisipasi berbasis FPIC yang berkonsekuensi pada desain. Dengan demikian, wacana perlindungan bergerak dari slogan ke akuntabilitas sosial-ekologis..

DAFTAR PUSTAKA

- Chowkwanyun, M. (2023). Environmental Justice: Where It Has Been, and Where It Might Be Going. In *Annual Review of Public Health* (Vol. 44, pp. 93–111). Annual Reviews Inc. <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-071621-064925>
- Dunn, A. D., & Dunn, A. D. (n.d.). *UMKC Law Review UMKC Law Review Volume 92 Number 4 Sustainability: A Legal Value and a Legal Principal Part of the Environmental Law Commons, and the Legal Ethics and Professional Responsibility Commons Recommended Citation Recommended Citation AT THE INTERSECTION OF ENVIRONMENTAL JUSTICE AND SUSTAINABILITY LIES A MORE EQUITABLE, HEALTHY FUTURE FOR U.S. COMMUNITIES*. <https://irlaw.umkc.edu/lawreviewhttps://irlaw.umkc.edu/lawreview/vol92/iss4/5>
- Prihartono, R. (2022a). *Analisis Wacana Kritis Model Teun A. van Dijk dalam “#DebatKeren Papua-Budiman Sudjatmiko VS Dandhy Laksono” (Kajian Analisis Wacana Kritis)* (Vol. 1, Issue 2).
- Prihartono, R. (2022b). *Analisis Wacana Kritis Model Teun A. van Dijk dalam “#DebatKeren Papua-Budiman Sudjatmiko VS Dandhy Laksono” (Kajian Analisis Wacana Kritis)* (Vol. 1, Issue 2).
- Stibbe, & Arran. (n.d.). *ECOLINGUISTICS. Urban flood management in Jakarta This document is part of a collection of six case studies selected from the work conducted by the Technology Executive Committee (TEC) on “Good practices and lessons learned on the setup and implementation of National Systems of Innovation”. It specifically focuses on the urban flood management strategies in Jakarta. (n.d.). https://www.researchgate.net/profile/Hans-Georg-Bohle/publication/305391391_Megacities*
- Wahyuningsih, S. E., Hartono, D., Mashdurohatun, A., & Hr, M. (2024). *International Journal of Law www.lawjournals.org The problem of justice for Indonesian fishermen in Marine Environmental Management. www.lawjournals.org*